

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan secara runtut pada bab sebelumnya mengenai semiosis sistem pejabat era Joseon dalam film *Olppaemi* (2022) dengan berlandaskan kodifikasi hukum *Gyeongguk Daejeon*, peneliti merumuskan simpulan sebagai berikut:

Klasifikasi pejabat era Joseon di dalam landasan hukum *Gyeongguk Daejeon*, khususnya pada jilid *Ijeon* (Kepegawaian) dan *Byeonjeon* (Hukum Militer), merupakan wujud nyata dari kristalisasi ideologi Neo-Konfusianisme yang diterapkan secara rigid, matematis, dan absolut ke dalam struktur ketatanegaraan. Sistem manajemen birokrasi ini membagi seluruh aparatur sipil (*Munban*) dan militer (*Muban*) secara vertikal ke dalam 9 Peringkat Utama (*Jeong*) dan 9 Peringkat Sekunder (*Jong*) hingga membentuk 18 tingkatan pangkat kedinasan (*pungye*) yang mengatur status sosial serta hak kepegawaian secara teratur. Regulasi hukum tersebut membelah kasta politik dan hak istimewa birokrasi secara tegas pada tingkat Peringkat 3. Pembelahan ini memisahkan elite pengambil keputusan senior (*Dangsangwan*) yang memiliki hak prerogatif untuk melakukan audiensi langsung di aula utama bersama raja, dari golongan pelaksana teknis operasional di bawahnya yang diklasifikasikan sebagai *Danghagwan*. *Gyeongguk Daejeon* juga menetapkan diskriminasi hukum serta pembatasan mobilitas vertikal (*Geumhan*) yang sangat ketat bagi rumpun Pejabat Teknis (*Japjik*) yang berasal dari kelas

menengah (*Jungin*). Regulasi ini bertujuan mengunci tubuh sosial pejabat spesialis, seperti praktisi kedokteran dan akupunktur istana, secara permanen sebagai pelaksana teknis murni dan menghalangi mereka secara hukum untuk menduduki jabatan kementerian struktural yang strategis.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis dan pembahasan mengenai semiotika Charles Sanders Peirce dalam film *Olppaemi* (2022), dapat disimpulkan bahwa tanda-tanda yang merepresentasikan pejabat era Joseon dalam film dibangun melalui hubungan triadik antara representamen, objek, dan interpretan. Analisis dilakukan terhadap tanda-tanda visual dan verbal yang muncul dalam tujuh adegan yang menampilkan pejabat era Joseon.

Pada aspek representamen, tanda-tanda yang ditemukan dalam film berupa warna jubah resmi dallyeong, motif sulaman lencana pangkat hyungbae, bahan dan bentuk sabuk resmi, ornamen penutup kepala, kepemilikan senjata, jubah medis putih polos, batas ruang gerak fisik di lingkungan Istana Changdeok, serta tuturan dialog formal kedinasan. Tanda-tanda tersebut menjadi penanda visual dan verbal yang membedakan kedudukan serta fungsi pejabat dalam struktur birokrasi Joseon. Pada aspek objek, tanda-tanda tersebut merujuk pada sistem klasifikasi pejabat era Joseon yang berlandaskan Gyeongguk Daejeon, khususnya melalui pembagian pangkat, kelas, dan rumpun tugas pejabat. Hasil penelitian menemukan tujuh status jabatan yang direpresentasikan dalam film, yaitu Yeonguijeong (Perdana Menteri) Jeong 1-pum, Hogu (Komandan Resimen Penjaga) Jeong 4-pum, Pan-ui (Kepala Tabib Istana) Jong 3-pum, Sago (Komandan Peleton Patroli) Jeong 6-pum, Chim-baksa (Ahli Akupunktur Utama Istana) Jong 5-pum, Gammungwan (Pejabat Pengawas Pintu

Gerbang/Akses Istana) Jong 6-pum, dan Musungwan (Petugas Keamanan Penjaga Gerbang Luar Istana) Jong 9-pum. Pada aspek interpretan, hubungan antara representamen dan objek menghasilkan pemaknaan mengenai kedudukan, pangkat, kewenangan, fungsi, serta batas ruang pejabat dalam struktur birokrasi Joseon. Pakaian, atribut, senjata, posisi spasial, dan dialog yang ditampilkan tidak hanya menunjukkan identitas tokoh, tetapi juga memaknai relasi kekuasaan dan perbedaan kedudukan sosial antarpejabat. Dalam hasil analisis, interpretan pada adegan-adegan tersebut berada pada tingkat Argument (Penalaran Konseptual Hukum secara Logis), karena hubungan antara tanda visual maupun verbal dengan objek historis menghasilkan pemaknaan mengenai fungsi dan kewenangan pejabat berdasarkan aturan birokrasi Joseon.

Dengan demikian, berdasarkan analisis semiotika Charles Sanders Peirce, film *Olppaemi* (2022) membangun makna mengenai klasifikasi pejabat era Joseon melalui tanda-tanda visual dan verbal yang saling berkaitan antara representamen, objek, dan interpretan. Tanda-tanda tersebut berhasil mengomunikasikan peta relasi kuasa, hak prerogatif spasial, wewenang hukum militer, serta marginalisasi kelas sosial kelompok fungsional (Jungin) yang disegmentasikan melalui aturan birokrasi dan pakaian resmi negara.

4.2 Saran

Berdasarkan ruang lingkup, keterbatasan, serta temuan yang diperoleh di dalam penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti merumuskan beberapa saran akademis yang konstruktif dan mendalam demi kemajuan studi budaya, sejarah, serta kebahasaan Korea di masa yang akan datang:

Mengingat keterbatasan durasi naratif dalam objek material berupa film layar lebar, peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji topik sistem tata negara tradisional Korea disarankan untuk memperluas cakupan data dengan beralih pada objek material berupa drama televisi berseri sejarah (*saeguk*) yang memiliki ruang lingkup cerita lebih panjang dan kompleks. Hal ini dinilai sangat krusial agar variasi korps jabatan birokrasi yang dianalisis dapat mencakup rumpun kementerian yang lebih luas dan bervariasi di luar fungsi militeristik dan medis, seperti representasi pejabat kementerian keuangan (*Hojeon*) dalam mengatur pajak atau kementerian hukum pidana (*Hyeongjeon*) dalam mengeksekusi peradilan. Selain itu, disarankan pula untuk mengintegrasikan pendekatan semiotika triadik Charles Sanders Peirce dengan Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis*) atau Teori Hegemoni Gramsci, guna membedah secara lebih tajam dan kritis mengenai bagaimana konstruksi dialog formal drama sejarah secara aktif mereproduksi ideologi kekuasaan, mendominasi kesadaran kelas bawah, serta mempertahankan hak istimewa kelas bangsawan (*Yangban*) terhadap kelas sosial di bawahnya.

Hasil penelitian ilmiah ini diharapkan tidak hanya berhenti sebagai dokumen akademis, melainkan dapat dioptimalkan secara praktis sebagai bahan rujukan teoretis tambahan atau materi pendukung pembelajaran visual berbasis multimedia dalam matakuliah Sejarah Korea Tradisional, Kebudayaan Korea, maupun Linguistik Kebudayaan di lingkungan Program Studi Bahasa Korea. Pemanfaatan karya sinematik populer seperti film sejarah sebagai teks budaya terbukti dapat menjadi jembatan pedagogis yang efektif untuk membantu mahasiswa dalam mengurai, memahami, dan menganalisis

kompleksitas sistem administrasi tata negara, stratifikasi birokrasi yang rumit, serta landasan hukum masa lalu secara lebih konkret, interaktif, dan kritis, tanpa harus kehilangan esensi bobot ilmiah dari data historis tertulis yang asli. Langkah implementasi ini diharapkan mampu memicu daya nalar kritis mahasiswa agar tidak sekadar menikmati film sejarah sebagai produk hiburan populer, tetapi mampu mengidentifikasi dan membedah muatan ideologis serta struktur kekuasaan politis yang terselubung di balik estetika visual sinematik drama sejarah Korea masa kini.

